

DAFTAR PUSTAKA

- Bahuwa, Tiara Oktaviani; Aneta, Asna; Agussalim, A. (2025). No Title. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 2937–2943.
- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*.
- Eko, S. (2017). *Desa Membangun Indonesia*.
- Handoko, T. H. (2003). *Manajemen*.
- Hutabarat, Siska Br.; Dewi, R. S. (2022). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD): Studi kasus Desa Lae Pinang Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 261–268.
- Kooiman, J. (2003). *Governing as governance*.
- Kurniati, P. N. (2021). *Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Peningkatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*.
- Lexy J. Moleong. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen kinerja sektor publik*.
- Makarilang, Mercylia; Siar, Lendy; Lowing, N. (2025). Transparansi pengelolaan anggaran dana desa: Studi kasus Desa Parangen Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud. *Lex Administratum*, 13(1), 1.
- Mardiasmo. (2018a). *Akuntansi sektor publik: Penerapan akuntansi keuangan daerah*.
- Mardiasmo. (2018b). *Akuntansi sektor publik: Pengelolaan keuangan daerah*.
- Mardiasmo. (2018c). *Akuntansi Sektor Publik*.
- Miles, Matthew B.; Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN beserta perubahannya. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa*.

- Republik Indonesia: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*.
- Sari, N., Hidayat, M., & Nugroho, R. (2019). *Pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan Ekonomi Lokal*.
- Sedarmayanti. (2017). *Good Governance: Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance*.
- Sedarmayanti. (2012a). *Good governance (Kepemerintahan yang baik): Dalam rangka otonomi daerah dan upaya pemberantasan korupsi*.
- Sedarmayanti. (2012b). *Good governance (Kepemerintahan yang baik) dalam rangka otonomi daerah: Upaya membangun organisasi yang efektif dan efisien melalui restrukturisasi dan pemberdayaan*.
- Sedarmayanti. (2012c). *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah dan Upaya Meningkatkan Kinerja Pemerintah*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- United Nations Development Programme. (1997). *Governance for sustainable human development*.
- United Nations Development Programme (UNDP). (1997). *Governance for sustainable human development: A UNDP policy document*.
- World Bank. (1992). *Governance and development*.

LAMPIRAN



**UPT. PERPUSTAKAAN PUSAT
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA KUPANG**

Nomor Pokok Perpustakaan: 5371002D2020114
Jl. Prof Dr. Herman Johanès, Penfui Timur, Kupang Tengah, Kab. Kupang.
Website: <https://perpustakaan.unwira.com/> e-mail: lib.unwira@gmail.com

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

Nomor: 0325/WM.H16/SK.CP/2026

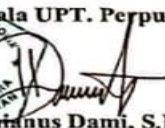
Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Ernesto Do Santos Nahak
NIM : 42122027
Fakultas/Prodi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Administrasi Publik
Dosen Pembimbing : 1. Hendrikus Likusina Kaha, S.IP., M.Si.
2. Kristianus Simon H. Molan, S.Sos., M.A.P.
Judul Skripsi/Thesis : **Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa, di Desa Rafae, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu**

Skripsi/Thesis yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan Turnitin dengan hasil kemiripan (*similarity*) sebesar **24 (Dua Puluh Empat)%**.
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 27 Februari 2026

Kepala UPT. Perpustakaan Unwira,


Damianus Dami, S.Ptk.



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
KECAMATAN RAIMANUK
DESA RAFAE
HALIHEDIBESI

Jalan Raya.Halilulik - Betun.Km 29 HALIHEDIBESI
Kode Pos 85761

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor : Ds. Rf. 140/674 / XI / 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Rafae, Kecamatan Raimanuk,
Kabupaten Belu Menerangkan dengan sebenarnya :

Nama : **ERNESTO DO SANTOS NAHAK**
NIM : 42122027
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Program Studi : S1 Administrasi Publik
Pekerjaan : Mahasiswa / Pelajar
Alamat : Dusun Obor, RT/RW, 002/002, Desa Rafae,
Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu.

Benar-benar telah selesai melakukan penelitian di **DESA RAFAE, KECAMATAN RAIMANUK, KABUPATEN BELU** selama 2 (dua) minggu terhitung mulai tanggal 25 November 2025 s/d 09 Desember 2025 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“TRANSPARANSI PEMERINTAH DALAM PENGGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA, DI DESA RAFAE, KECAMATAN RAIMANUK, KABUPATEN BELU”**.

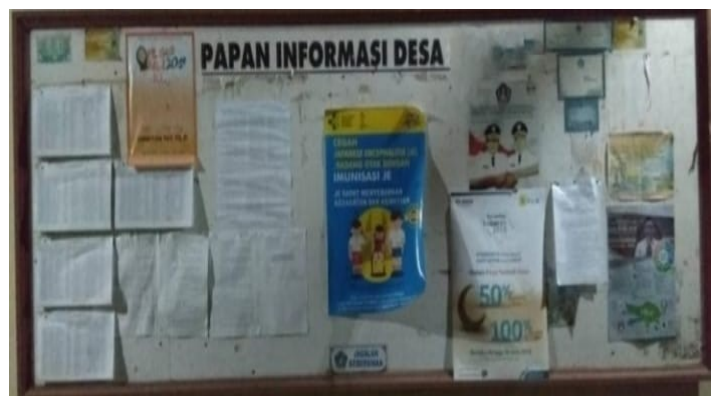
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar – benarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Halihedibesi, 09 Desember 2025

Kepala Desa Rafae,



HIRONYMUS PAREIRA

[illegible]

DAFTAR PERTANYAAN:

1. Keterbukaan Informasi

☐ Tahap Perencanaan

- 1) Apakah pemerintah desa menyampaikan informasi awal mengenai jumlah dan rencana penggunaan Dana Desa kepada masyarakat secara terbuka?
- 2) Bagaimana bentuk penyampaian informasi rencana program pembangunan desa kepada masyarakat?
- 3) Apakah dokumen RKPDDes dan APBDes diumumkan secara transparan dan mudah diakses oleh warga?
- 4) Apakah papan informasi atau media publik digunakan untuk menampilkan program prioritas desa?

☐ Tahap Pelaksanaan

- 1) Apakah pemerintah desa memberikan informasi secara berkala tentang pelaksanaan kegiatan Dana Desa kepada masyarakat?
- 2) Apakah papan proyek memuat rincian seperti nilai anggaran, waktu kerja, dan sumber dana?
- 3) Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam memantau kegiatan pembangunan yang sedang berjalan?
- 4) Apakah masyarakat memperoleh kesempatan untuk mengetahui perubahan dalam pelaksanaan program?

☐ Tahap Evaluasi

- 1) Apakah hasil kegiatan dan realisasi anggaran dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat?
- 2) Bagaimana cara pemerintah desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa?
- 3) laporan keuangan dan hasil pembangunan tersedia dalam bentuk yang mudah dipahami masyarakat?
- 4) Apakah masyarakat dapat memberikan tanggapan terhadap laporan pertanggungjawaban pemerintah desa?

2. Aksesibilitas Informasi

□ Tahap Perencanaan

- 1) Apakah informasi tentang rencana penggunaan Dana Desa dapat diakses oleh semua warga tanpa batasan kelompok tertentu?
- 2) Apakah waktu dan tempat musyawarah desa diatur agar semua lapisan masyarakat bisa hadir?
- 3) Apakah media penyampaian informasi (seperti papan pengumuman, baliho, atau grup WhatsApp desa) dapat dijangkau oleh warga?
- 4) Apakah masyarakat mengetahui kepada siapa harus meminta informasi tentang rencana kegiatan desa?

□ Tahap Pelaksanaan

- 1) Apakah masyarakat dapat memperoleh informasi tentang pelaksanaan program tanpa prosedur yang rumit?
- 2) Apakah pemerintah desa bersedia memberikan jawaban atas pertanyaan atau permintaan informasi dari masyarakat?
- 3) Apakah informasi disebarluaskan melalui berbagai saluran komunikasi, bukan hanya di kantor desa?
- 4) Apakah warga merasa bahwa akses terhadap informasi selama pelaksanaan program bersifat terbuka dan tidak diskriminatif?

□ Tahap Evaluasi

- 1) Apakah masyarakat dapat dengan mudah mengakses laporan realisasi keuangan Dana Desa?
- 2) Apakah pemerintah desa menanggapi permintaan data publik dengan cepat dan terbuka?
- 3) Apakah hasil evaluasi kegiatan diumumkan di tempat yang mudah dijangkau masyarakat?
- 4) Apakah tersedia media publik (misalnya papan informasi atau website desa) untuk melihat hasil pelaporan keuangan dan pembangunan?

3. Partisipasi Masyarakat

□ Tahap Perencanaan

- 1) Apakah masyarakat dilibatkan secara aktif dalam penyusunan prioritas program dan rencana kerja desa (RKPDDes)?
- 2) Apakah warga diberi kesempatan untuk mengajukan usulan atau pendapat dalam musyawarah desa?
- 3) Apakah kelompok perempuan, pemuda, dan masyarakat marginal turut berpartisipasi dalam proses perencanaan?
- 4) Apakah hasil musyawarah desa mencerminkan aspirasi masyarakat secara menyeluruh?

□ Tahap Pelaksanaan

- 1) Apakah masyarakat ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, misalnya dalam bentuk gotong royong atau tenaga kerja lokal?
- 2) Apakah warga memiliki kesempatan memberikan masukan selama kegiatan berlangsung?
- 3) Apakah komunikasi antara pelaksana kegiatan dan warga desa berlangsung secara terbuka dan dua arah?
- 4) Apakah masyarakat turut berperan dalam mengawasi pelaksanaan proyek Dana Desa?

□ Tahap Evaluasi

- 1) Apakah masyarakat dilibatkan dalam kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan pertanggungjawaban Dana Desa?
- 2) Apakah warga dapat memberikan kritik atau saran terhadap hasil pembangunan desa?
- 3) Apakah terdapat forum publik atau pertemuan khusus untuk menilai capaian dan kendala pelaksanaan program?
- 4) Apakah masukan masyarakat dipertimbangkan dalam penyusunan laporan akhir dan perencanaan berikutnya?